

PEMIKIRAN POLITIK THAHA HUSEIN, MUHAMMAD ASAD DAN ABU AL-A'LA AL-MAUDUDI TERHADAP RELEVANSI ANTARA NEGARA DAN AGAMA

Annisa Sakinah Putri Siregar¹, Habib Zikri², *Vidia Alfisyahri Ramadhani³, Marzuki⁴

annisasakinah048@gmail.com¹, habibzikri944@gmail.com², alfisyvi@gmail.com³,
marzuki110000173@uinsu.ac.id⁴

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui relevansi antara agama dan negara menurut sudut pandang dari tiga orang tokoh yaitu Thaha Husein, Muhammad Asad dan Abu Al-A'la Al-Maududi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian kepustakaan. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah a) Thaha Husein mengenai relevansi antara negara dan agama menekankan pentingnya sekularisme, kebebasan berpikir, dan pendidikan sebagai landasan bagi kemajuan sosial dan politik. Pandangan-pandangannya mencerminkan upaya untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif, progresif, dan berorientasi pada masa depan.b) perspektif Muhammad Asad, negara dan agama dalam Islam harus saling melengkapi dan mendukung satu sama lain dalam menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan beretika. Ia mengusulkan integrasi yang seimbang antara prinsip-prinsip agama dan kebutuhan modernitas, dengan penekanan pada keadilan sosial, demokrasi, dan hak asasi manusia.c) perspektif Abu Al-A'la Al-Maududi, relevansi antara negara dan agama sangat erat, dengan negara berperan sebagai pelaksana hukum syariah dan penjaga moralitas serta keadilan dalam masyarakat. Ia melihat negara Islam sebagai satu-satunya cara untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan bermoral, yang sesuai dengan kehendak Tuhan.

Kata Kunci: Politik, Agama, Negara

PENDAHULUAN

Thaha Husein adalah seorang tokoh intelektual Mesir yang berpengaruh, dikenal sebagai "Bapak Sastra Arab Modern." Ia lahir pada tahun 1889 di sebuah desa kecil di Mesir dan menjadi buta pada usia tiga tahun. Namun, keterbatasan fisiknya tidak menghalangi semangatnya untuk belajar Thaha Husein adalah sosok yang kompleks dan berpengaruh dalam sejarah intelektual dunia Arab. Pemikirannya yang mendalam tentang sekularisme, modernitas, dan reformasi pendidikan mencerminkan keinginannya untuk melihat masyarakat Arab yang maju dan inklusif. Kritiknya terhadap ortodoksi dan dukungannya terhadap kebebasan berpikir menjadikannya tokoh yang kontroversial, namun sangat dihormati dalam dunia sastra dan pemikiran Arab. Karyanya terus menjadi sumber inspirasi bagi banyak intelektual dan reformis di dunia Arab hingga saat ini.

Muhammad Asad adalah sosok yang unik dan berpengaruh dalam sejarah intelektual Islam modern. Karyanya sebagai penulis, pemikir, dan diplomat mencerminkan keinginannya untuk membangun jembatan antara budaya Barat dan Islam, serta untuk mempromosikan pemahaman yang mendalam tentang Islam dalam konteks zaman modern. Ia dihormati karena kontribusinya yang luas dalam bidang agama, pendidikan, dan diplomasi, dan karyanya terus mempengaruhi pemikiran Islam kontemporer hingga saat ini.

Sayyid Abul A'la Maududi adalah tokoh yang kontroversial namun sangat

berpengaruh dalam sejarah pemikiran Islam modern. Pemikirannya tentang teokrasi Islam, hakimiyyah, dan reformasi sosial dan politik telah mempengaruhi gerakan Islamis di seluruh dunia. Karya-karyanya yang luas dan pemikirannya yang inovatif terus mempengaruhi pemikiran Islam kontemporer hingga saat ini.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini adalah kajian kepustakaan (library research) dimana data yang dijadikan rujukan dan sumber tulisan adalah buku, jurnal, maupun artikel yang memuat pemikiran dari Thaha Husein ataupun yang menulis tentangnya. Sedangkan metode yang digunakan untuk mengolah data yang telah dikumpulkan oleh penulis adalah dengan metode historical factual dengan menganalisa kembali peninggalan sejarah terkait dengan pemikiran Thaha Husein dan menganalisa bagaimana ia memperoleh segala pengetahuannya agar kemudian penulis dapat memahami corak dari pemikiran politik Thaha Husein serta segala manifestasi keilmuannya

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Thaha Husein

1. Biografi

Thaha Husein, tokoh pemikir Islam modern liberal ini dilahirkan pada 14 November 1889 di desa Maghraga dengan sungai Nil tepatnya di Mesir. Ia dilahirkan dari seorang keluarga petani, ia merupakan anak ke 13 dari 15 bersaudara dari ibundanya yang merupakan istri kedua dari ayahnya. Thaha Husein mengalami kebutaan total pada usia 6 tahun disebabkan cacar (ophthalmia) yang terjadi dari usia 2 tahun.

Namun keadaan fisiknya yang buta tidak menghalangnya semangatnya dalam menuntut ilmu. Setelah menyelesaikan pendidikannya di maktab, ia melanjutkan studinya ke Universitas Al-Azhar pada tahun 1902 namun pada saat itu pendidikannya masih terbelakang sehingga tidak mampu mengakomodasi semangat kebebasan berfikirnya bahkan sebagian pengajarnya tidak mendukung pemikirannya karena mereka masih diliputi pemikiran yang belum modern. Pada saat Thaha mendapat bimbingan dari Sayyid Ali Al-Marshafi terkait pengetahuan bahasa Arab di waktu yang bersamaan ia bertemu dengan Muhammad Abduh dan ia tertarik dengan pemikirannya sehingga mereka sering bertukar fikiran dan bertanya-tanya tentang masalah-masalah yang dianggap baku oleh masyarakat pada umumnya.

Sebab Thaha merasa ketidakpuasan atas sistem pendidikan Al-Azhar kemudian ia pindah ke Universitas Cairo Mesir tepat pada tahun 1908. Disana ia mendapatkan sesuatu yang selama ini ia cari dan hal itu tidak ia dapatkan selama di Al-Azhar, yaitu ia disana bisa mempelajari sejarah, politik dan filsafat bahkan ia juga belajar dengan beberapa orientalis Eropa disana yang bernama Nillano, Littman, Santillana dan Louis Magssignon sehingga Thaha dapat menyelesaikan disertasinya yang berjudul *Zikra Abi Al- A'la* pada tahun 1914 dan mendapatkan predikat Cumlaude.

Setelah tahun 1918 Thaha Husein meraih gelar doktor di Universitas Sorbone di Perancis, ia mengabdi di Universitas Cairo dan Universitas Alexandria. Jabatan penting yang ia duduki pada masa itu yaitu sebagai Dekan Fakultas Sastra Universitas Cairo Mesir pada tahun 1936, Rektor Universitas Alexandria pada tahun 1942-1944 dan Menteri Pendidikan Mesir pada 1950-1952.5 Ia sudah menikah dengan wanita Perancis yang dikenalnya semenjak pertama kali ke Perancis. Disamping itu ia juga merupakan penulis semenjak masa perkuliahan, ia menulis banyak majalah diantaranya majalah

Al-Jaridah dimana ia bertemu Luthfi As-Sayyid selaku pendiri dan editor majalah tersebut.

Thaha menulis karya-karya yang diantaranya *Fi Al-Syi'r Al-Jahiliyah, Falsafah Ibnu Khaldun Al-Ijtimaiyat, Mustaqbal Ats-Tsaqafah Fi Al-Mishr, Al-Fitnah AlKubra, Al-Ayyam* dan lainnya. Namun salah satu karyanya yang sempat menjadi kontroversial yaitu *Fi Al-Syi'r Al-Jahiliyah*. Buku ini terbit pada tahun 1926 yang berisikan rangkuman perkuliahan yang disampaikannya pada bidang Puisi Arab Jahiliyah. Didalamnya berisi bentuk keraguan Thaha Husein terhadap historis dan reliabilitas beberapa segi ungkapan dalam Al-Qur'an.

Thaha Husein meninggal pada 28 Oktober 1973 pada usia 84 tahun. Setelah kepergianya pada akhir tahun 1973 ia dinobatkan sebagai penerima hadiah Nobel dalam bidang sastra.⁸

2. Pemikiran Politik Thaha Husein

Pada abad 19, pergolakan yang sangat kuat terjadi antara pemikir nasionalis sekuler dengan kalangan ulama' tradisionalis. Pertentangan ini dimulai ketika muhammad Ali Pasha menggulirkan ide-ide modernisasi Mesir dengan mengadopsi ilmu pengetahuan dan teknologi barat.⁹ Kelompok pemikir nasionalis sekuler mendukung ide tersebut, sedangkan kelompok ulama tradisionalis bersikap oposisi. Menurut kelompok ulama, modernisasi yang bersumber dari sistem kepercayaan asing dipandang sebagai pengebalian pada perkembangan pemikiran Islam tradisional. Efeknya, tentu akan memberi ancaman bukan hanya bagi ulama itu sendiri, namun juga institusi Islam lainnya.

Jika para ulama tradisionalis menolak pengadopsian nilai-nilai ilmu pengetahuan dan peradaban Barat karena dianggap bid'ah dan bertentangan dengan ajaran Islam, maka kaum nasionalis sekuler berbalik menuduh bahwa sikap ulama-ulama tradisional tersebut merupakan wujud keterbelakangan mereka dan menganggap mereka sebagai kendala modernisasi di Mesir.

Sekularisasi menurut Nurcholish Madjid berbeda dengan sekularisme. Sekularisasi ialah pengakuan wewenang ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam membina kehidupan duniawi. Sedangkan sekularisme adalah paham keduniawian dan bertentangan dengan hampir seluruh agama dunia. Sekularisasi tidaklah dimaksudkan penerapan sekularisme dan merubah kaum muslimin menjadi kaum sekularis, tapi untuk menduniakan sesuatu nilai yang sudah semestinya bersifat duniawi dan melepaskan umat Islam dari kecenderungan untuk mengukhrawikannya.

Menurut Thaha Husein, Barat berhasil mencapai keberhasilannya disebabkan mereka berani meninggalkan agama mereka. Oleh karena itu tidak ada salahnya umat Islam mengadopsi peradaban Barat. Sebelumnya umat Islam juga pernah menerima unsur-unsur Yunani dan Persia ke dalam peradaban mereka kemudian sebab itu juga lah yang menghantarkan umat Islam kepada puncak kemajuannya.dengan mengambil peradaban Barat, tanpa agamanya, umat Islam dapat menuju kemajuan dan kehidupan modern.

Ide sekularisasi politik yang dikembangkan oleh Thaha Husein secara eksplisit lebih bertanggung jawab dibanding sikap sebaliknya dimana seseorang menolak Barat dalam setiap ucapan namun menerapkannya dalam setiap perbuatan. Obsesi Thaha Husein untuk meniru bentuk dan sistem pemerintahan Barat adalah untuk membuktikan tidak adanya panduan dan ajaran baku mengenai sistem pemerintahan dan politik dalam Alquran dan Hadis, sekaligus menunjukkan bahwa sistem demokrasi Barat yang terlaksana mampu mewujudkan penegakan norma-norma dan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi manusia. Bahkan, dalam pelaksanaannya, demokrasi telah mencegah penyalahgunaan terburuk dari kekuasaan.¹⁴

B. Muhammad Asad

1. Biografi

Muhammad Asad adalah seorang tokoh Islam dunia, seorang cendekiawan muslim termashur. Lahir di Lamberg, Austria-Hongaria 2 Juli pada tahun 1900. Ia terlahir sebagai Leopold, dalam lingkungan keluarga Yahudi, kecuali ayahnya, Akiva Weiss, keluar dari tradisi dan menjadi seorang pengacara. Asad memiliki seorang putra, Talal

Asad, dari istri Arab Saudi keduanya, Munira. Talal Asad sekarang adalah seorang antropolog yang berspesialisasi dalam studi agama dan postkolonialisme. Asad juga memiliki anak tiri bernama Heinrich (nama yang dikonversi Ahmad) dengan istri pertamanya Else (nama yang dikonversi Aziza).¹ Ia mengenyam pendidikan agama sejak kecil, hingga berkenalan dengan bahasa Aram, Kitab Perjanjian Lama serta teks-teks maupun tafsir dari Talmud, Mishnah, Gemara,

Pada umur 22 tahun, beliau mengunjungi Timur Tengah dan selanjutnya menjadi wartawan luar negeri "Frankfurter" Zeitung." Setelah masuk Islam, ia pergi dan bekerja di seluruh dunia Islam, mulai Afrika Utara sampai Afghanistan di bagian Timur, dan setelah beberapa tahun mempelajari Islam, ia telah menjadi seorang Muslim terpelajar yang terkemuka di abad kita sekarang. Muhammad Asad, sebagai cendekiawan yang cerdas, maka tidak heran setelah berdirinya negara Pakistan, ia ditunjuk menjadi Director of the Department of Islamic Reconstruction di Punjab Barat, kemudian diangkat sebagai wakil Pakistan di PBB. Tiga buku Mohammad Asad yang penting ialah "Islam in the Cross Roads, Road to Mecca (Jalan keMekah), The Principles of State of Government in Islam (Dasar-Dasar Negara dan Pemerintahan Dalam Islam). Beliau juga menerbitkan majalah bulanan "Arafat".¹

Muhammad Asad, salah seorang pemikir Islam teragung yang pernah hidup, akan tetapi hampir tidak di kenali di Barat dan suatu misteri bagi kebanyakan orang Islam sendiri. Tetapi, kepada mereka yang mengikuti kehidupannya melalui buku-buku dan penulisannya, pasti mengetahui bahwa tidak ada seorang pun yang lebih banyak memberi sumbangan di dalam zaman ini terhadap kefahaman Islam dan kebangkitan umat Islam, atau berkerja lebih keras untuk membina jambatan diantara Timur dan Barat, melebihi daripada Muhammad Asad. Muhammad Asad memasuki sekolah dasar lalu sekolah menengah, kemudian meneruskan belajar hukum hingga mencapai lisensi dalam bidang hukum. Selanjutnya ia meneruskan ke Fakultas Hukum di Universite de Paris di Perancis, lalu dilanjutkan pula sampai mencapai tingkat doktoral dalam ekonomi dan politik dan memperoleh Ph.D.

Semasa masih mahasiswa sampai pada waktu menjalankan pekerjaannya sebagai wartawan, ia terus aktif menulis. Umumnya ia menulis dalam masalah-masalah hukum, sosial dan politik, di samping juga memberikan kuliah dalam bidang Ilmu Politik dan

Hukum Tata Negara. Muhammad Asad berasal dari keluarga yang sangat tekun dalam mengabdikan diri kepada ilmu pengetahuan dan peradilan secara turun-temurun, sehingga keluarga mereka dikenal sebagai keluarga hakim.

Muhammad Asad sebagai sosok yang gemar membaca, dan berguru pada setiap orang yang dianggap mumpuni. Guru beliau sangat banyak, baik sebelum maupun sesudah masuk Islam. Guru-guru Muhammad Asad antara lain, Manheim, Logmann, Emeric Edward, Dalberg Acton, Maynard, Syekh Ahmad Musthafa bin Muhammad bin

Abdul Mun'im al-Maraghi, Syekh Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Bukhait AlMuthi'i, Ahmad Rifa'i Al-Fayumi, dan lain-lain.

2. Pemikiran Politik Muhammad Asad

Negara Islam dibangun di atas teori bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem pemerintahan yang baku. Islam hanya meletakan seperangkat tata nilai etika yang dapat dijadikan sebagai pedoman dasar bagi tingkah laku manusia dalam kehidupan dan pergaulan dengan sesamanya. Yang dimaksud dengan pedoman dasar tersebut adalah

prinsip tauhid, sunatullah, dan persamaan sesama manusia. Pedoman tersebut menjadi pijakan bagi perumusan prinsip-prinsip dasar Negara Islam, yaitu prinsip persaudaraan, persamaan, dan kebebasan. Sebagaimana yang dikemukakan Muhammad Asad:

“There is not only one form of the Islamic state, but many and it is for the Muslims of every period to discover the form most suitable to their needs on the condition, of course, that the form and the institutions they choose are in full agreement with the explicit, unequivocal shar‘i laws relating to communal life” literatur yang berkenaan dengan teori politik Islam yang ditulis oleh para ulama Islam masa lalu, kajian-kajian yang lazimnya hanya mengemukakan suasana politik masa-masa Dinasti Abbasiah yang sering kali pula hanya dimaksudkan untuk memuaskan keinginan pihak penguasa waktu itu. Tetapi terutama pada berbagai ide tertentu yang banyak tersebar dikalangan umat Islam, dulu maupun kini, yang menyatakan bahwa hanya ada satu bentuk Negara yang layak disebut sebagai “Negara Islam”, yakni bentuk pemerintahan yang ada pada masa Khulafa’ ar-Rasyidin, dan setiap penyimpangan dari bentuk seperti ini jelas menyimpang dari apa yang disebut “Negara Islam”. Asad merasa pasti bahwa tidak ada kekeliruan sedikitpun dalam pandangan seperti ini. Apabila dikaji secara teliti hukum-hukum khusus yang berkenaan dengan persoalan politik dalam Al-Qur‘an dan Sunnah Rasul, maka tidak akan menemukan adanya nash pada keduanya yang menetapkan bentuk Negara tertentu, artinya syari‘at Islam tidak mengemukakan contoh tertentu yang mesti diambil sebagai pola Negara Islam. Sementara itu, Al-Quran dan Sunnah Rasul sama sekali bukanlah khayalan dan utopia. Secara tegas keduanya menggariskan metodologi politik yang amat jelas yang selamanya seirama dengan perkembangan zaman dan perubahan kondisi kemanusiaan. Justru karena metode politik itu dimaksudkan agar sesuai dengan perkembangan kondisi dan waktu, maka ia hanya dikemukakan secara garis besar dan tidak dalam detail-detailnya. Kebutuhan politis manusia adalah merupakan kebutuhan yang selalu terikat dengan waktu, dan selamanya berubah seirama dengan perubahan dan perjalanan waktu itu sendiri. Sistem-sistem dan hukum-hukum yang ditetapkan secara kaku, pasti Pemikiran Muhammad Asad secara umum berpegang teguh pada AlQuran dan Sunnah, menurut Asad Al-Quran dan Sunnah sangatlah penting sebagai pedoman hidup umat Islam maupun manusia pada umumnya. Oleh karena itu dalam memandang sebuah negara pun

Asad berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah, Asad berpendapat bahwa kajian mengenai negara yang ada di dalam al-quran dan sunnah bukanlah khayalan belaka. Keduanya berbanding lurus dengan perkembangan politik seiring bergantinya kondisi dan waktu, meskipun al-quran dan sunnah tidak memberikan gambaran secara mendetail, namun sudah cukup jelas mengemukakan secara garis besar nya. Asad tidak setuju dengan bentuk tunggal negara Islam. Menurutnya negara Islam memiliki banyak bentuk tergantung kepada masyarakat Islam menginginkan negara yang seperti apa. Dengan syarat bentuk negara Islam yang disepakati secara bersama itu sesuai dengan hukum syara’ yang berkenaan dengan sistem kehidupan sosial. Dengan begitu, Asad menafsirkan bahwa hukum kenegaraan yang sempurna adalah seperti pada masa pemerintahan al-khulafa’ al-rasyidun, bagi dari segi perangkat administrasi maupun sistem pemerintahannya. Bagi Asad, pemerintahan yang dijalankan oleh Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Afan, dan Ali bin Abi Thalib merupakan wujud negara Islam dalam pengertian yang sesungguhnya. 10

Pengaruh Sosial Politik terhadap Pemikiran Muhammad Asad tentang Tidak Terdapatnya Pemisahan Yang Tegas antara Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif dalam Sistem Pemerintahan Islam Pemikiran Muhammad Asad tentang tidak terdapatnya pemisahan yang tegas antara legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam sistem

pemerintahan Islam adalah sangat dipengaruhi oleh sistem ketatanegaraan di Amerika Serikat. Muhammad Asad melihat bahwa dalam praktik penyelenggaraan negara, teori trias politika sangat sulit untuk diterapkan secara konsisten. Amerika Serikat yang dianggap konsisten menerapkan ajaran Montesquieu ini, namun tetap tidak dapat melaksanakannya secara murni, dalam pemikiran Muhammad Asad bahwa kesukarankesukaran dalam menerapkan ajaran pemisahan kekuasaan (separation of power) secara murni dan konsekuensi, memunculkan ajaran pembagian atau pemencaran kekuasaan (division or distribution of powers). Tidak bisa dipungkiri dalam praktik penyelenggaraan negara selalu terdapat hubungan kekuasaan (hubungan fungsi) antara organ negara yang satu dengan organ negara yang lainnya. Akibatnya satu organ dapat memiliki beberapa fungsi kekuasaan negara. Dalam pemikiran Muhammad Asad bahwa di Amerika Serikat sendiri ajaran Montesquieu ini dipertahankan dengan mengkombinasikan dengan sistem saling mengawasi dan mengimbangi (check and balances system) antar cabang kekuasaan negara. Di samping itu, muncul pula ajaran-ajaran baru mengenai pembagian kekuasaan negara, yaitu dwi praja, dan catur praja.

C. Abu Al-A'la Al-Maududi

1. Biografi

Abu Al-A'la Al-Maududi lahir pada tanggal 25 September 1903 Masehi/ 3 Rajab 1321 H di Aungrabad atau yang sekarang dikenal dengan Andhra Pradesh, India. Abu Al-A'la Al-Maududi adalah anak yang paling terakhir dari tiga bersaudara. Ayah Abu Al-A'la Al-Maududi bernama Ahmad Hasan dan ibunya bernama Sayyidah Ruqayyah yang merupakan putri bungsu dari Mirza Qurban Ali Bik. Ia berasal dari keluarga yang terhormat dan memiliki tradisi lama sebagai pemimpin agama karena memiliki keturunan dari syaikh-syaikh sufi yang terkenal.

Pendidikan yang diterima oleh Maududi adalah berasal dari ayahnya sendiri di rumah hingga tamat tingkat dasar. Setelah selesai dari tingkat dasar Maududi melanjutkan studinya di Madrasah Fauqaniyah yang memadukan pendidikan modern barat dengan pendidikan Islam tradisional. Setelah tamat, ia ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi, namun ia memiliki kendala dari hal ekonomi serta kesehatan ayahnya yang semakin memburuk.

Akhirnya Maududi ikut pindah bersama ayahnya ke Hyderabad dan melanjutkan pendidikannya di Dar al-Ulm, di Deoband. Akan tetapi ia hanya menjalani pendidikan selama 6 bulan karena merawat ayahnya yang sakit dan akhirnya meninggal dunia. Setelah terhenti secara formal dari Dar al-Ulm, ia melanjutkan pendidikannya secara otodidak dan pada usia 20 tahun, ia telah menguasai bahasa Arab, Persia, Inggris dan terutama sekali bahasa Urdu.

2. Pemikiran Politik Abu Al-A'la Al-Maududi

Elemen dasar dari pola pikir Abu Al-A'la Al-Maududi adalah ketauhidannya yang sangat mendarah daging. Menurut Maududi, semua prinsip hukum, adat kebiasaan yang berbeda dengan petunjuk tuhan harus dijauhi karena dianggap menolak kedaulatan tuhan dan membuat tuhan-tuhan selain daripada tuhan.

Karena hal inilah, kerangka dasar pemikiran Maududi selalu diwarnai dengan cara hidup Islami sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Alquran dan Sunnah karena lebih baik dan lebih sesuai untuk membawa kepada kebahagiaan manusia dan usaha untuk memenuhi kebutuhan serta mendatangkan keselamatan di hari akhir kelak.

Abu Al-A'la Al-Maududi mendasarkan pemikirannya terhadap politik menjadi 3 hal, yaitu :

1. Islam adalah agama paripurna, lengkap dengan petunjuk untuk mengatur kehidupan manusia termasuk kehidupan politik.

2. Kekuasaan tertinggi hanya ada di tangan Allah dan umat Islam hanyalah pelaksana atau sebagai khalifah Allah di bumi.

Sistem politik Islam adalah sistem politik yang universal dan tidak mengenai batas wilayah ikatan geografis, bahasa dan kebangsaan

KESIMPULAN

- a. Thaha Husein menekankan pentingnya pemisahan antara agama dan negara, kebebasan intelektual, dan reformasi pendidikan untuk mencapai kemajuan sosial dan politik. Ia mendukung sekularisme sebagai jalan untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan progresif, dengan identitas nasional yang didasarkan pada sejarah dan budaya bersama, bukan agama. Kritiknya terhadap otoritas keagamaan yang konservatif mencerminkan keinginannya untuk melihat dunia Muslim yang lebih dinamis, bebas, dan berorientasi pada masa depan.
- b. Muhammad Asad menekankan pentingnya integrasi yang seimbang antara prinsip-prinsip agama dan kebutuhan modernitas. Ia mendukung penerapan hukum syariah dengan interpretasi yang dinamis dan kontekstual, serta demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Asad juga menekankan perlindungan terhadap kebebasan individu dan hak asasi manusia, serta peran penting etika dan moralitas dalam pemerintahan. Pandangan-pandangannya mencerminkan upaya untuk menciptakan masyarakat Islam yang adil, makmur, dan beretika, yang mampu menghadapi tantangan zaman modern.
- c. Sedangkan Abu Al-A'la Al-Maududi memiliki pemikiran tentang politik seperti memberikan fondasi ideologis bagi banyak gerakan Islamis kontemporer. Ia mengusulkan negara Islam yang diatur oleh hukum syariah dengan sistem teodemokrasi di mana kedaulatan berada di tangan Tuhan, tetapi partisipasi rakyat tetap dihargai melalui konsultasi (shura). Al-Maududi menekankan pentingnya kesatuan umat Islam, penerapan syariah, reformasi sosial dan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, serta pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Kritiknya terhadap sekularisme dan demokrasi Barat mencerminkan keinginannya untuk melihat dunia Muslim yang lebih berpegang pada nilai-nilai dan hukum Islam.

DAFTAR PUSAKA

- Amri, Syaiful, 'Pemikiran Politik Thaha Husein: Pro Kontra Sekularisasi Di Dunia Islam', Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah, 10.2 (2022), 21–39
<<https://doi.org/10.30821/al-usrah.v10i2.13896>>
- Iqbal, Muhammad, 'Implementasi Pemikiran Politik Abu Al'a Al-Maududi Dalam Dinamika Politik Kontemporer', 2006, 83
- Khobir, Mohammad Azza Nasrul, 'DILEMA PENGGUNAAN SYI'IR JAHILIYYAH DALAM TAFSIR "Kajian Atas Pemikiran Thaha Husein"', Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, 2.02 (2020), 55–92 <<https://doi.org/10.24239/al-munir.v2i02.64>>
- Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer, Cet-3 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010)
- Satriadi, Inong, and Khairina, 'Pemikiran Abul a'La Al-Maududi Tentang Politik Islam', Jurnal IAIN BATUSANGKAR, 1.2 (2018), 195–201